

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PADA  
URUSAN KEPEGAWAIAN DI KANTOR IMIGRASI  
KELAS I TPI (TEMPAT PEMERIKSAAN  
IMIGRASI) PALEMBANG TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**RIZKA JULIANTI RAHMATIA**

**0701181621043**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FEBRUARI 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PADA  
URUSAN KEPEGAWAIAN DI KANTOR IMIGRASI  
KELAS I TPI (TEMPAT PEMERIKSAAN  
IMIGRASI) PALEMBANG TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik


Oleh :

**RIZKA JULIANTI RAHMATIA**  
07011181621043

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2020

**Pembimbing I**

Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001



---

**Pembimbing II**

Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001



---

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Palembang Tahun 2018*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Februari 2020.

Indralaya, 12 Februari 2020

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

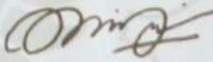


Anggota

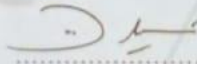
2. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001



3. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



4. Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002

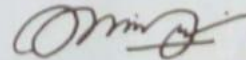


Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof./Dr. Agus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan”**

**Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini  
saya persembahkan untuk:**

- ✓ Kedua Orangtuaku, Ayahanda Asep Rahmat H.  
dan Ibunda Rihauyati
- ✓ Saudaraku, Keluargaku, Adikku
- ✓ Tim Riset, Akreditasi dan Laboratorium  
Administrasi Publik
- ✓ Teman-teman Seperjuanganku
- ✓ Almamaterku
- ✓ Kamu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Palembang Tahun 2018”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti.

Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan Skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Asep Rahmat Hermawan dan Ibu Rihayuati yang sangat mendukung dan selalu memberikan doa serta menjadi penyemangat untukku.
2. Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan Skripsi ini.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Sekaligus Dosen Pembimbing 2 dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik, staf beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
7. Seluruh Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
8. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
9. Untuk Sahabatku yang mendukung proses pembuatan Skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Jurusan Administrasi Publik.
10. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sedari awal hingga penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya,      Februari 2020  
Penulis

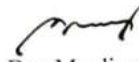
Rizka Julianti Rahmatia

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Palembang Tahun 2018”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas penggunaan anggaran pada urusan kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas keuangan dari Mustopadidjaja berdasarkan tiga dimensi untuk mengukur akuntabilitas keuangan yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 sudah cukup akuntabel, tetapi belum optimal karena keterbukaan informasi mengenai keuangan kepada publik tidak tersedia sehingga pada dimensi pengungkapan tidak baik. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebaiknya memberikan informasi keuangan kepada publik yang disajikan pada *website* Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Keuangan, Kepegawaian**

Pembimbing I



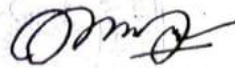
Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

Indralaya, 12 Februari 2020  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

### **ABSTRACT**

This study entitled "Accountability of Budget Use in Personnel Affairs at the Immigration Office Class I TPI (Immigration Checkpoint) Palembang in 2018". This study aims to find out how to account for the use of budgets in staffing affairs at the Immigration Class Office of TPI Palembang in 2018. The research method used in this study is a descriptive qualitative method. Sources of data obtained from primary data and secondary data, data collection techniques through observation, interviews and documentation. This research uses the theory of financial accountability from Mustopadidjaja based on three dimensions to measure financial accountability, namely financial integrity, disclosure, and observance of laws and regulations. The results of this study indicate that the Accountability of Budget Use in Personnel Affairs at the Immigration Office of Class I Palembang in 2018 is quite accountable, but not optimal because the disclosure of information about finances to the public is not available so that the disclosure dimension is not good. The advice recommended in this study is that it should provide financial information to the public that is presented on the website of the Palembang Class I Immigration Office.

**Keywords: Accountability, Finance, Staffing**

Advisor I



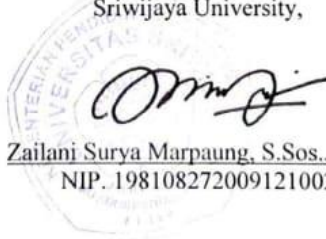
Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001

Advisor II



Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001

Indralaya, 12 February 2020  
Head of Public Administration Department  
Faculty of Social and Political Sciences  
Sriwijaya University,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
1. Manfaat Praktis.....	9
2. Manfaat Teoritis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Landasan Teori .....	11
1. Akuntabilitas.....	11
2. Anggaran .....	14
3. Akuntabilitas Keuangan .....	18
4. Kepegawaian .....	20
5. Teori Akuntabilitas Keuangan yang Digunakan .....	21
B. Penelitian Terdahulu .....	22
C. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Definisi Konsep .....	25
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Informan Penelitian .....	27



E. Jenis dan Sumber Data .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	28
G. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
1. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....	31
2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	35
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	35
4. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....	36
B. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 .....	45
1. Integritas Keuangan.....	46
2. Pengungkapan.....	52
3. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Alokasi Anggaran Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2018 .....	4
Tabel 2 Rincian Kertas Kerja Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 .....	5
Tabel 3 Rincian Kertas Kerja Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2019 .....	6
Tabel 4 Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2018 .....	7
Tabel 5 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 6 Fokus Penelitian.....	27
Tbael 7 Rincian Kertas Kerja Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 .....	47
Tabel 8 Laporan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	48

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 2. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.....	31
Gambar 3. Konsumsi Senam .....	49
Gambar 4. Kegiatan Pembinaan Rohani Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....	49
Gambar 5. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.....	51
Gambar 6. <i>Website</i> Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang .....	54
Gambar 7. Nota Pembelian.....	56
Gambar 8. Absensi Pegawai Kegiatan Pembinaan Rohani Pegawai.....	57
Gambar 9. Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 .....	59
Gambar 10. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	60
Gambar 11. Neraca Tahun 2018.....	61
Gambar 12. Laporan Operasional Tahun 2018 .....	62
Gambar 13. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2018.....	63
Gambar 14. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 .....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
2. Surat Keputusan Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Surat Balasan Penelitian
5. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
6. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
7. Kartu Perbaikan Seminar Proposal
8. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
10. Kartu Perbaikan Skripsi
11. Pedoman Wawancara
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
14. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018

## DAFTAR SINGKATAN

1. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. BPKP : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
4. GASB : *Governmental Accounting Standards Board*
5. LAN : Lembaga Administrasi Negara
6. NCGA : *National Committee on Gonermental Accounting*
7. TPI : Tempat Pemeriksaan Imigrasi
8. RKK : Rincian Kertas Kerja
9. SAP : Standar Akuntansi Pemerintah

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut *good governance* (pemerintahan yang baik). Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Bab I Pasal 3 menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Kelembagaan pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah diterapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dan dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Mustopadidjaja, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah bekerja dengan ekonomis, efisien, dan efektif atau belum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 2 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Oleh karena itu, sebagai entitas pelaporan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, yang dimaksud dengan Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Dengan demikian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di Kota Palembang. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengacu pada Rencana Strategis 2015-2019 Kementerian Hukum dan HAM, Visi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”. Kemudian misinya yaitu :



1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas
3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas
4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan HAM
5. Mewujudkan aparatur kementerian hukum yang profesional dan berintegritas

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terdiri beberapa seksi-seksi dan subseksi serta subbagian, salah satunya yaitu Urusan Kepegawaian. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi Pasal 53 Ayat (1), urusan kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

Untuk melaksanakan tugasnya Urusan Kepegawaian membutuhkan anggaran. Adanya anggaran diharapkan menjadi kerangka kerja untuk menentukan prestasi dan kinerja karyawan. Anggaran merupakan penentuan tujuan itu sendiri, dengan kata lain anggaran sebagai alat pengimplementasian tujuan tersebut. Adapun alokasi anggaran Urusan Kepegawaian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Alokasi Anggaran Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2019**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi Anggaran (Rp)</b>	<b>Sisa Anggaran (Rp)</b>	<b>Presentase (%)</b>
2017	423.634.000	406.398.750	17.235.250	96,93%
2018	581.480.000	551.522.050	29.957.950	94,84%
2019	142.632.000	54.669.170	87.96.830	38,32%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2019*

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat penurunan anggaran pada urusan kepegawaian di tahun 2019. Kemudian, anggaran pada tahun 2018 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2019. Realisasi anggaran Urusan Kepegawaian pada tahun 2018 mencapai 94,84%, pencapaian ini dapat dikategorikan efektif. Namun persentase realisasi anggaran pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu sebesar 2.09%. lalu, pada tahun 2019 tingkat penyerapannya pada semester I sejumlah 38,32%. Besarnya anggaran pada tahun 2018 urusan kepegawaian, tentunya berpengaruh pada besarnya pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran tersebut.

Urusan Kepegawaian tentunya menyusun rencana kegiatan yang perlu dilakukan berkaitan dengan tugasnya. Berikut adalah rincian kegiatan pada Urusan Kepegawaian.

**Tabel 2. Rincian Kegiatan Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>Urusan Kepegawaian</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
1	Belanja Bahan Konsumsi Rapat Biaya <i>Coffe Morning</i> Konsumsi Senam Pembinaan Rohani Pegawai	61.800.000
2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Biaya Pelatihan	125.920.000
3	Beban Jasa Lainnya Honorarium Rohanlawan Honorarium Instruktur Olahraga	16.000.000
4	Belanja Perjalanan Biasa Biaya Transportasi Uang Harian Uang Penginapan	64.680.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uang Transport Dalam Kota	3.000.000
6	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Transport Peserta Paket <i>FullBoard</i> Konsumsi dan Akomodasi Peserta	310.080.000
	<b>Total</b>	<b>581.480.000</b>

Sumber: Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018

**Tabel 3. Rincian Kegiatan Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2019**

No	Urusan Kepegawaian	Anggaran
1	Belanja Bahan Biaya <i>Coffe Morning</i> Konsumsi Senam Pembinaan Rohani Pegawai Makan Rapat Biasa Sumatera Selatan	Rp61.800.000
2	Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	Rp.30.800.000
3	Beban Jasa Lainnya Honorarium Rohanlawan Honorarium Instruktur Olahraga	Rp16.000.000
4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Biaya Transportasi Uang Harian Uang Penginapan	Rp31.032.000
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Uang Transport Dalam Kota	Rp3.000.000
	<b>Total</b>	<b>Rp142.632.000</b>

Sumber: Rincian Kertas Kerja Satker Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2019

Jika dilihat pada tahun 2018 terdiri dari enam mata anggaran yang memiliki kegiatan masing-masing, sedangkan pada tahun 2019 hanya ada lima. Tahun 2018 ada alokasi anggaran Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota, sedangkan tahun 2019 tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Selain itu, pada tahun 2018 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota memperoleh alokasi anggaran yang paling besar dibandingkan dengan kegiatan lainnya yaitu sebesar Rp310.080.000. atau 53,32% dari keseluruhan anggaran pada Urusan Kepegawaian.

Alokasi anggaran pada tahun 2018 yang besar tentunya dapat mempengaruhi dalam perencanaan kegiatan yang akan dilakukan, karena suatu instansi pemerintah tentunya akan merencanakan kegiatan berdasarkan anggaran yang tersedia sesuai dengan tugasnya. Oleh

sebab itu, apabila anggaran yang tersedia besar maka kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan pun beragam, dan begitu pula sebaliknya.

Kepegawaian dalam bidang kantor peranannya cukup penting, melalui kepegawaian ini kantor bisa beroperasi secara disiplin dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk dapat menyelenggarakan pemerintah pemerintahan yang efektif dan efisien, dibutuhkannya bagian kepegawaian agar pegawai dapat bekerja secara profesional.

Penyerapan anggaran memerlukan adanya perimbangan dan proporsi pergerakan yang berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tapi yang lebih penting adalah bagaimana penyerapan anggaran mampu memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan bangsa dan negara. Berikut adalah realisasi anggaran Urusan Kepegawaian Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada tahun 2017-2018.

**Tabel 4. Realisasi Anggaran Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2018**

Kode	Uraian	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	(%)
053	<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	2017	423.634.000	406.398.750	17.235.250	95,93%
521211	Belanja Bahan		136.200.000	126.786.500	9.413.500	93,08%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		145.856.000	143.560.000	2.296.000	98,42%
522191	Beban Jasa Lainnya		11.200.000	11.000.000	200.000	98,21%
524111	Belanja Perjalanan Biasa		32.778.000	29.051.900	3.726.100	88,63%
524113	Belanja Perjalanan		1.600.000	1.050.000	550.000	65,62%

	Transport Dalam Kota					
524119	Belanja Perjalanan Lainnya		96.000.000	94.950.350	1.049.650	98,90%
053	<b>Pengelolaan Kepegawaian</b>	2018	581.480.000	551.552.050	29.957.950	94,85%
521211	Belanja Bahan		61.800.000	58.420.300	3.379.700	94,53%
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		125.920.000	123.072.000	2.848.000	97,73%
522191	Beban Jasa Lainnya		16.000.000	5.400.000	10.600.000	33,75%
524111	Belanja Perjalanan Biasa		64.680.000	63.084.150	1.595.850	97,53%
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.000.000	2.700.000	300.000	90%
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		310.080.000	298.845.600	11.234.400	96,37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2017-2018

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada Urusan Kepegawaian terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya dapat dikatakan tidak efektif yaitu kegiatan Beban Jasa Lainnya dengan persentase penyerapan anggaran hanya 33,75%. Selain itu, sisa anggaran lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp10.000.000. Jika dilihat persentase realisasi anggaran pada kegiatan Belanja Jasa Lainnya tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu menurun sebesar 64,46%. Penurunan ini cukup signifikan, dimana pada tahun 2017 persentase realisasi anggarannya mampu mencapai 98,21%.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai “Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan anggaran pada Urusan Kepegawaian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus informasi bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mengenai pertanggungjawaban anggaran untuk mengambil keputusan yang lebih baik dimasa yang akan datang guna mampu mengelola keuangan negara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan anggaran pada suatu instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

AR, Mustopadidjaja. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Administrasi Publik 2019

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Cisca. 2008. *EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR.

Lionardo, Andries. 2011. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang : TUNGGAL MANDIRI PUBLISHING.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIN YKPN.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV ANDI.

Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM PRESS.

Saksono, Slamet. 2000. *Administrasi Kepegawaian*. Yogyakarta: KANISIUS.

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*. Bandung: CV. Mandar Maju

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*. Bandung: ALFABETA.

Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE.

### Jurnal

Nur Syuroidah, N. S. (2018). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan). 7 (5).



- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. 3 (1).
- Sa-adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). 3 (2).
- Sudirman Pauwah, I. S. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. 2 (3).
- Widhianningrum, P. J. (2017). Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan . 6 (2).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

### **Dokumen**

Laporan Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018

Rincian Kertas Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2018

### **Skripsi dan Tesis**

Khalid, F. (2010). *Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus Pada Direktorat Pembinaan SLB*. Tesis: Universitas Indonesia.

Rahmawati, Ari. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2012*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.

Utami, Y. (2018). *Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pendetensian Deteni Tahap Perawatan Oleh Subseksi Penindakan Keimigrasian Tahun 2017 di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas I Palembang*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.

Yamini, S. (2018). *Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang*. Skripsi: Universitas Sriwijaya.

**Sumber Internet**

<https://accounting.binus.ac.id/>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>